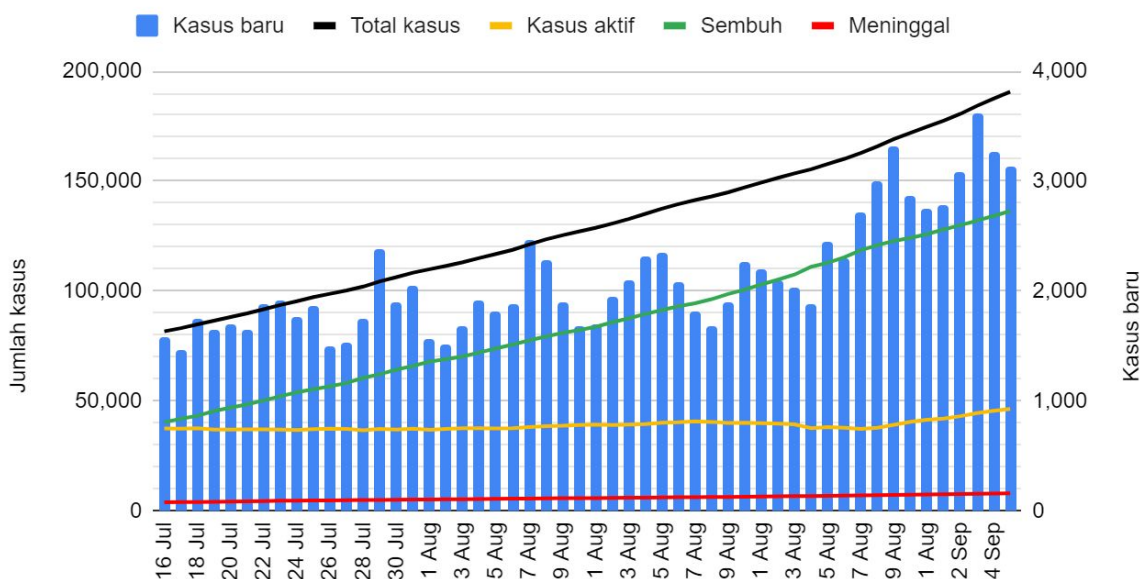


## Wajah Baru Pendidikan Indonesia

*Kasus positif Covid-19 terus meningkat. Sistem pendidikan di Indonesia harus berubah dan menyesuaikan untuk terus mendidik anak harapan bangsa.*

Tercatat 5 September 2020, total kasus positif Covid-19 sebanyak 190.665 orang. Angka ini bahkan masih jauh mencapai puncaknya, sebagaimana disebutkan oleh Kawal Covid-19, organisasi sukarela yang mengawal informasi Covid-19 di Indonesia. Sebelumnya, Kawal Covid-19 memprediksi puncak kasus positif adalah bulan Juli 2020 yang ternyata salah. Koordinator Kawal Covid-19, Miki Salam, mengatakan penyebab salah prediksi adalah pelacakan kontak di Indonesia masih minim, tes tidak menyeluruh, isolasi tidak meningkat signifikan, dan kondisi masa transisi *new normal*.

### COVID-19 di Indonesia (5 September 2020)



*Sumber: Kementerian Kesehatan RI*

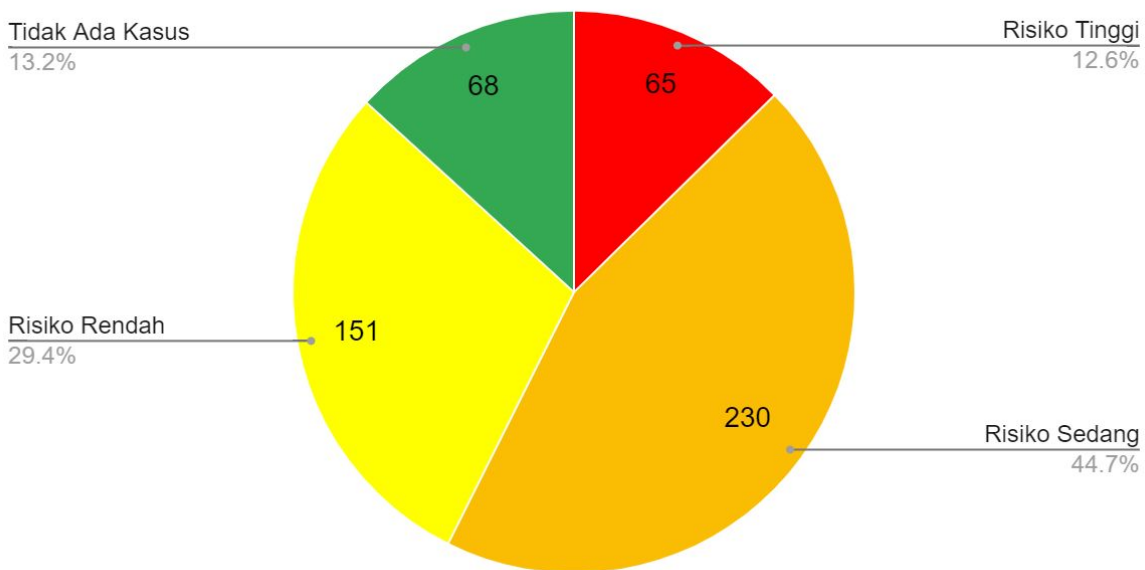
Peningkatan kasus positif Covid-19 sangat berdampak pada sistem pendidikan Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 untuk menyambut tahun ajaran baru 2020/2021 yang dimulai Juli 2020.

Revisi SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 7 Agustus 2020 menyebutkan pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning, sedangkan zona

oranye dan zona merah tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). Penentuan zona berdasarkan peta risiko covid19.go.id yang terdiri wilayah risiko tinggi (merah), risiko sedang (oranye), risiko rendah (kuning), dan tidak ada kasus/tidak terdampak (hijau). Tercatat 30 Agustus 2020, terdapat 295 atau 57.2% dari total 514 kota/kabupaten yang masih berada di zona merah dan zona oranye sehingga harus tetap melangsungkan BDR atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sedangkan 219 kota/kabupaten lainnya dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan dan dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis.

## Persentase Risiko Kota/Kabupaten

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 30 Agustus 2020



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan terdapat 4 syarat untuk dapat melangsungkan pembelajaran tatap muka. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau
2. Pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin.
3. Satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.
4. Orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

## Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh

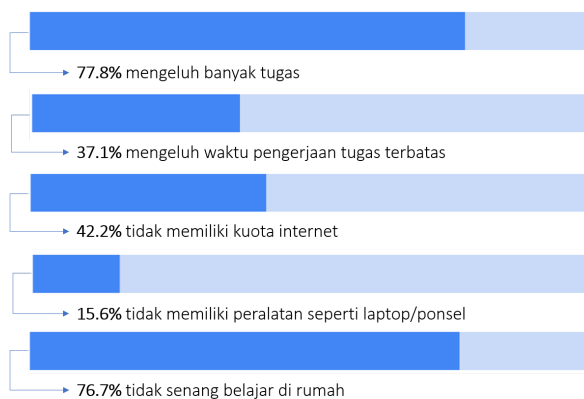
PJJ adalah adalah proses pembelajaran siswa dan guru dengan lokasi terpisah. Surat edaran pelaksanaan pembelajaran daring/PJJ untuk mencegah penyebaran Covid-19 sudah dikeluarkan Mendikbud sejak 17 Maret 2020. Mendikbud juga tanggap dengan meluncurkan program Belajar dari Rumah pada 9 April 2020 disiarkan melalui TVRI untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan

ekonomi maupun letak geografis. Lantas seberapa efektif PJJ untuk pembelajaran siswa? Dan apakah program BDR yang dicanangkan Mendikbud efektif?

Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan total 246 pengaduan dari 1.700 siswa pada 13-21 April 2020, PJJ masih memiliki kesulitan seperti 77.8% mengeluh tugas terlalu banyak, 76.7% siswa menyatakan tidak senang belajar di rumah, 42.2% tidak memiliki kuota internet, 37.1% mengeluh waktu pengerjaan tugas terbatas, dan 15.6% responden tidak memiliki peralatan seperti laptop atau ponsel. Tingginya persentase siswa yang mengeluh disebabkan karena perubahan sistem pembelajaran yang mendadak dari semula tatap muka menjadi jarak jauh. Siswa juga dituntut untuk menyiapkan fasilitas penunjang PJJ seperti kuota internet dan laptop/ponsel. Akibatnya, terdapat siswa yang tidak memiliki kuota internet memadai dan peralatan laptop/ponsel.

### Kesulitan Pembelajaran Jarak Jauh

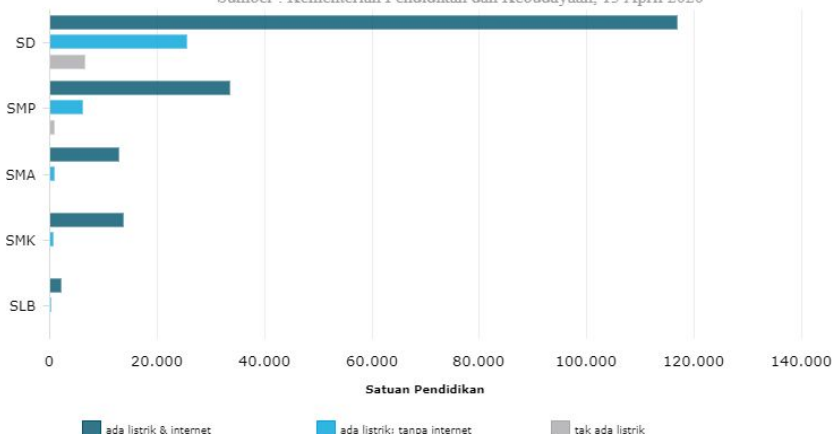
Sumber: Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia 13-21 April 2020



Selain itu, tercatat 13 April 2020 data dari Kemendikbud terdapat 179.097 (81.5%) satuan pendidikan yang mempunyai akses listrik dan internet, 33.227 (15.1%) satuan pendidikan mempunyai listrik tetapi tidak tersentuh internet, dan 7.552 (3.4%) satuan pendidikan tak tersentuh listrik dan internet.

### Ketersediaan Listrik & Akses Internet pada Satuan Pendidikan

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 13 April 2020



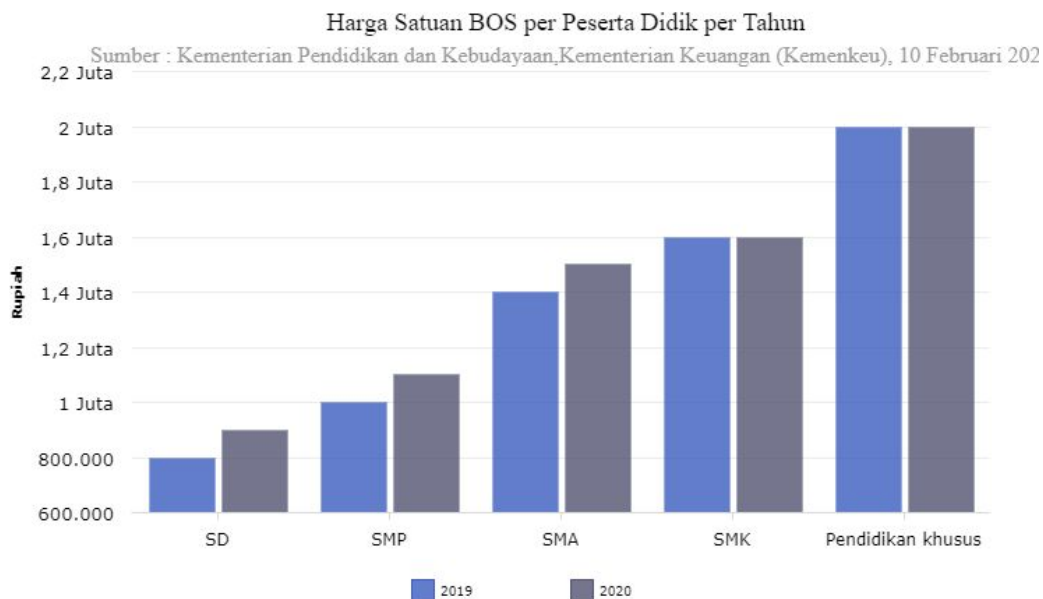
Adanya fasilitas akses internet dan listrik pada satuan pendidikan dapat membantu guru dalam merancang materi pembelajaran ketika kesulitan akses internet. Namun, masih terdapat 15.1% satuan pendidikan yang tidak memiliki akses internet bahkan 3.4% satuan pendidikan yang tidak tersedia listrik dan internet. Hal ini dapat dipastikan PJJ tidak dapat dilaksanakan secara efektif pada wilayah tanpa akses internet bahkan listrik. Lantas bagaimana efektivitas program BDR yang dicanangkan Mendikbud bagi yang kesulitan akses internet?

Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Profesor Edy Suandi Hamid, menyebutkan bahwa program BDR yang disiarkan stasiun TVRI tidak akan berjalan efektif karena hanya berjalan satu arah saja. Tambahnya, program pembelajaran melalui stasiun televisi tidak akan bisa menggantikan proses belajar mengajar di kelas.

Program BDR juga belum bisa memenuhi total jam belajar siswa karena penayangan hanya 30 menit per hari untuk tiap tingkatan pendidikan. Namun, keandalan TVRI yang melingkupi jaringan seluruh Indonesia hingga pelosok daerah, memberikan kemanfaatan agar siswa tetap dapat terus belajar.

## Bantuan Kuota Internet

Untuk menjawab masalah kuota internet, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan pernyataan pada 15 Juni 2020 bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membeli kuota internet. Alokasi dana BOS dalam APBN 2020 juga meningkat 6% dibandingkan tahun lalu. Jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing mendapatkan Rp 900 ribu, Rp 1.1 juta, dan Rp 1.5 juta per tahun. Harapannya ini dapat membantu siswa untuk terus belajar selama PJJ.



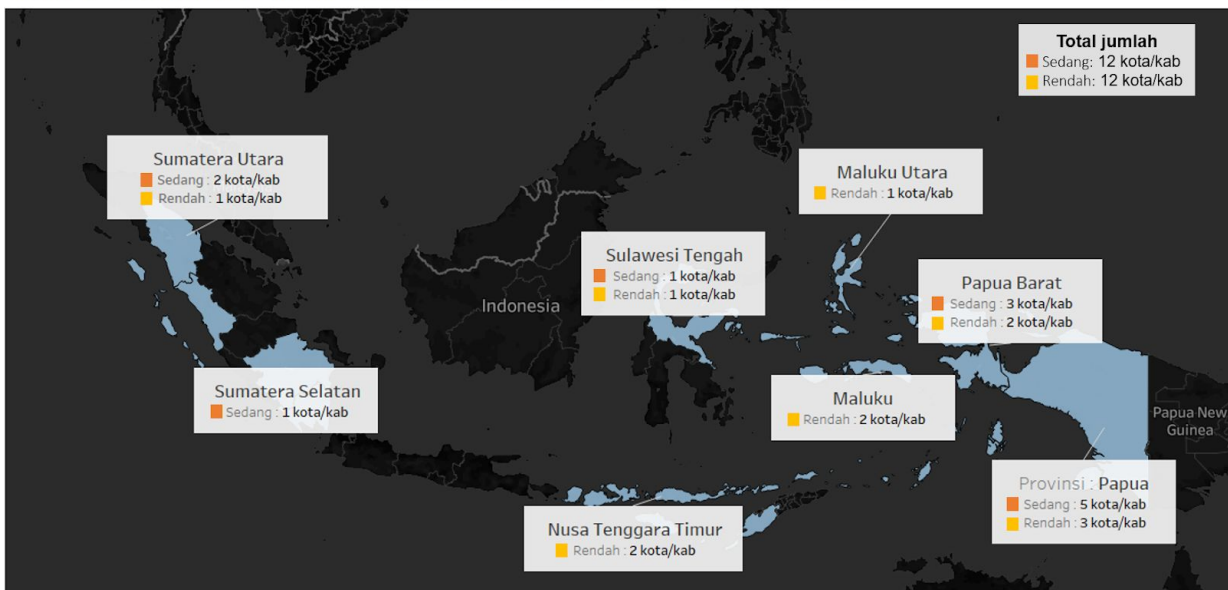
## Pembelajaran pada Daerah Tertinggal

Dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terdapat 62 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Daerah tertinggal merupakan salah satu tugas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu di Direktorat Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT). Adanya daerah tertinggal harus menjadi perhatian khusus bagi Kemendikbud dalam memastikan keberlangsungan pembelajaran siswa.

Berdasarkan peta risiko pada 30 Agustus 2020, terdapat 38 kota/kabupaten yang tidak terdampak (zona hijau), 12 kota/kabupaten yang berisiko rendah (zona kuning), dan 12 kota/kabupaten yang berisiko sedang (zona oranye).

## Peta Risiko Daerah Tertinggal

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 30 Agustus 2020



Maka, 12 kota/kabupaten yang berada di zona oranye harus melangsungkan PJJ. 12 kota/kabupaten yang berada di zona oranye adalah sebagai berikut:

Tabel Kabupaten/Kota pada Zona Oranye

Provinsi	Kabupaten/Kota	Zona
Sumatera Utara	Nias Barat	Risiko Sedang
Sumatera Utara	Nias Selatan	Risiko Sedang
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Risiko Sedang
Sulawesi Tengah	Donggala	Risiko Sedang
Papua	Keerom	Risiko Sedang

Papua	Lanny Jaya	Risiko Sedang
Papua	Mamberamo Tengah	Risiko Sedang
Papua	Nabire	Risiko Sedang
Papua	Yalimo	Risiko Sedang
Papua Barat	Maybrat	Risiko Sedang
Papua Barat	Sorong Selatan	Risiko Sedang
Papua Barat	Teluk Bintuni	Risiko Sedang

Kemendikbud telah memfasilitasi bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berupa modul belajar yang dicetak. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan modul belajar hanya diperuntukkan bagi jenjang SD dan PAUD karena dua jenjang tersebut paling sulit menjalankan PJJ. Modul belajar berisi kumpulan soal dan materi. Modul yang dibagikan ada tiga bentuk, yakni untuk guru, siswa, dan orang tua. Harapannya, dengan adanya modul dapat membantu siswa untuk terus belajar meskipun minim komunikasi dengan guru.

## Kebangkitan Pembelajaran Digital

Keberhasilan pendidikan di Indonesia perlu melibatkan kerjasama dari berbagai pihak terutama guru, orangtua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Adanya pandemi memacu guru untuk belajar membuat materi lebih kreatif agar siswa tidak mudah bosan. Orang tua dituntut aktif berperan mendidik anak. Lembaga pendidikan juga harus aktif ikut campur dalam proses pembelajaran guru dan siswa untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi. Pemerintah terutama Kemendikbud juga harus berani mengeluarkan atau merevisi kebijakan dan program secara cepat. Gotong royong dari berbagai pihak tersebut membantu transformasi wajah baru pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan didominasi pembelajaran daring.

Kemendikbud RI telah meluncurkan program digital baru dengan aktif bekerja sama dengan pihak lain. Program Sandiwara Sastra bekerjasama dengan Yayasan Titimangsa dan KawanKawan Media yang berupa siniar (*podcast*) dengan melibatkan pekerja seni ternama untuk mengangkat literasi karya sastra Indonesia. Selain itu, terdapat program Guru Berbagi bekerjasama dengan Google sebagai wadah bagi guru untuk saling bertukar Rancangan Program Pembelajaran (RPP) selama pandemi. Munculnya program baru menjadi kebangkitan pembelajaran digital, sehingga diharapkan dapat terus membuat siswa belajar secara menyenangkan.